BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan keluarga merupakan fondasi strategis dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan, sehingga tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan domestik rumah tangga (Soeradi, 2013). Ketahanan keluarga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan karena keluarga yang tangguh mampu membangun relasi yang harmonis antaranggota keluarga, menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga, serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap berbagai perubahan sosial dan dinamika ekonomi (Supriatna et al., 2024). Kondisi tersebut menjadikan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial dasar, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat dan nasional. Ketahanan keluarga juga berkontribusi langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara global, pentingnya peran keluarga dalam pembangunan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)*, khususnya Tujuan 3 tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan yang baik serta Tujuan 5 tentang kesetaraan gender yang menekankan pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dalam keluarga. Sejalan dengan komitmen global tersebut, Pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan keluarga

sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029, pemerintah menekankan peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. RPJMN menegaskan bahwa keluarga merupakan unit dasar pembangunan yang berperan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta menjadi fondasi ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Penguatan ketahanan keluarga dipandang sebagai langkah penting untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas relasi, pengasuhan, dan fungsi keluarga secara menyeluruh.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan ini merupakan regulasi payung (legal umbrella) yang mengintegrasikan urusan kependudukan dan pembinaan keluarga di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam aspek fisik dan nonfisik agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi dampak perubahan zaman.

Ketahanan keluarga dapat dikatakan sebuah kemampuan keluarga untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan

pulih dari berbagai kesulitan seperti krisis keuangan, perubahan sosial, atau tekanan dari luar sambil tetap melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Di Indonesia, keluarga dipandang sebagai blok pembangunan utama untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas tinggi, mendorong ketahanan masyarakat, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sehingga ini menjadi masalah pembangunan strategis. Ketahanan keluarga dipandang sebagai pondasi ketahanan nasional ketika keluarga kuat, budaya, nilai-nilai moral, dan stabilitas sosial terjaga, ketahanan bangsa terhadap berbagai tantangan termasuk radikalisme, kemiskinan, dan krisis kesehatan menjadi lebih besar (Kusuma Putri, 2023). Ketahanan keluarga tidak hanya tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga menjadi fokus kebijakan publik agar tercipta sinergi antara keluarga, komunitas, dan negara, dengan tujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

Peran ayah sangat krusial dalam membentuk ketahanan keluarga karena kehadirannya secara fisik dan emosional menciptakan lingkungan harmonis, optimalisasi tumbuh kembang anak, serta fondasi ketahanan nasional. Keterlibatan ayah secara langsung dapat memengaruhi perkembangan psikososial anak, ikatan keluarga, dan kestabilan emosional. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan meningkat signifikan menjadi 94,19% pada data terbaru BKKBN, mendukung interaksi harian keluarga dan pengasuhan bersama suami istri (Hadi, 2023). Keterlibatan ayah tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan finansial,

tetapi juga berperan dalam membangun kestabilan emosional, hubungan antaranggota keluarga, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi (Kumalasari et al., 2023). Memenuhi tuntutan finansial bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan ketahanan keluarga, faktor lain termasuk pengasuhan yang efektif, komunikasi, dan pembagian tanggung jawab yang adil antara ibu dan ayah. Dalam konteks tersebut, ayah tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai figur teladan dalam menanamkan nilai, norma, dan pembentukan karakter anak. Namun, dalam realitas sosial saat ini, peran ideal ayah tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam banyak keluarga yang kemudian memunculkan fenomena rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan atau yang dikenal dengan istilah *fatherless*.

Fenomena *fatherless* merujuk pada kondisi ketidakhadiran peran ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, maupun fungsional (Safitri, 2025). Fatherless tidak selalu berarti ketiadaan ayah secara biologis, tetapi juga mencakup minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, komunikasi, dan pembentukan karakter anak. Berdasarkan data Mikro Susenas Badan Pusat Statistik Maret 2024 menunjukkan jumlah anak berpotensi *fatherless* di Indonesia 2024 mencapai 15,9 juta atau sekitar 20,1 persen dari total anak di bawah usia 18 tahun. Sekitar 4,4 juta tanpa ayah di rumah tangga (3,75 juta dengan ibu saja, 654 ribu dengan kakek-nenek), dan 11,5 juta dengan ayah *overwork* . Dalam konteks ini, ayah hadir secara fisik namun absen secara emosional dan psikologis, sehingga

perannya dalam keluarga tidak berjalan secara optimal. Keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perkembangan anak. Ayah tidak semata-mata berfungsi sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga berperan sebagai sumber dukungan emosional, pembentuk karakter, serta teladan dalam kehidupan sosial anak (Miftakhurrohmah, 2026). Perubahan struktur sosial, tuntutan ekonomi, budaya patriarki, serta pembagian peran gender tradisional menjadi faktor utama yang mendorong munculnya fenomena fatherless. Ayah sering diposisikan semata-mata sebagai pencari nafkah, sementara peran pengasuhan sepenuhnya dibebankan kepada ibu. Pola ini menyebabkan rendahnya interaksi ayah dengan anak dan melemahnya relasi emosional dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan keluarga secara keseluruhan. Fenomena *fatherless* tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara peran ideal ayah dalam keluarga dan praktik pengasuhan yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan keluarga tidak dapat diserahkan semata-mata pada kesadaran individu, melainkan memerlukan intervensi kebijakan yang terarah dan sistematis untuk mendorong keterlibatan ayah secara aktif dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan program strategis yang mampu mengubah pola pikir, perilaku, serta peran ayah dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menghadirkan program

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai salah satu program *Quick Wins* yang strategis dan berdampak nyata bagi masyarakat, dengan fokus pada isu-isu pembangunan keluarga yang prioritas dan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam waktu relatif singkat (Santoso, 2025). Program *Quick Wins* merupakan bentuk intervensi kebijakan yang berfokus pada isu-isu prioritas pembangunan keluarga, seperti penguatan pengasuhan, pencegahan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi peran anggota keluarga dalam setiap fase kehidupan. Pendekatan ini menegaskan komitmen Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam menjawab permasalahan keluarga secara cepat, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu program *Quick Wins* tersebut adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), yang secara khusus diarahkan untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) lahir sebagai respons strategis terhadap fenomena fatherless yang melemahkan ketahanan keluarga di Indonesia. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada Senin, 21 April 2025 oleh Menteri Wihaji. GATI hadir sebagai respon terhadap rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indoenesia (Dwi, NH., 2025). Sasaran utama meliputi calon ayah, ayah dengan anak usia dini hingga remaja (10-24 tahun), guna menciptakan keluarga harmonis dan berkualitas yang mendukung ketahanan nasional.

Dalam upaya memperkuat keberhasilan kebijakan ketahanan keluarga hingga ke tingkat akar rumput, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 119 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Keputusan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang memberikan arah, standar, serta kerangka implementasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program secara sistematis dan terintegrasi. Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen Nomor 119/KEP/F2/Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia merupakan instrumen pemerintah untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi yang berkualitas, sementara keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang ideal dan optimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendukung keberhasilan program GATI dalam mewujudkan keluarga harmonis, meningkatkan perlindungan anak, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Sebagai instrumen kebijakan, Kepmen tersebut tidak hanya menjadi dasar legal formal, tetapi juga memuat panduan teknis yang mengatur peran aktor, mekanisme

pelaksanaan, serta bentuk kegiatan yang harus diadaptasi sesuai dengan konteks lokal masing-masing daerah. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu meminimalisir perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana serta memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ketahanan keluarga melalui Program GATI di Kota Makassar dijalankan di tingkat lapangan. Analisis ini secara khusus mengacu pada kesesuaian antara praktik implementasi dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana program ini berjalan efektif, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai pentingnya peran ayah dalam penguatan ketahanan keluarga serta peran Forum Genre sebagai agen edukasi dan pendampingan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi kebijakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Makassar.
b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Makassar.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaiamana implementasi kebijakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Makassar.
b. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Makassar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya pada bidang pembangunan keluarga dan kependudukan, dengan menambah referensi empiris mengenai peran ayah dalam pembentukan ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur terkait implementasi kebijakan publik dan program pembangunan keluarga melalui pendekatan komunitas kepemudaan, dan lingkup masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, khususnya di Kota Makassar sebagai bahan evaluasi dalam mengoptimalkan implementasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dalam mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaksana program dan masyarakat sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang harmonis dan

memiliki ketahanan yang kuat.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan tinjauan pustaka sebagai landasan teoretis dan konseptual dalam mengkaji implementasi kebijakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Makassar. Pembahasan dalam bagian ini meliputi konsep ketahanan keluarga, peran ayah dalam pengasuhan, fenomena fatherless, serta teori implementasi kebijakan. Tinjauan pustaka ini digunakan sebagai acuan untuk memperkuat kerangka analisis penelitian sekaligus menegaskan posisi penelitian dalam kajian pembangunan keluarga.landasan teoretis dan konseptual penelitian mengenai implementasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga.

1.4.1. Konsep Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk beradaptasi, bangkit, dan pulih dari berbagai tekanan atau krisis, sehingga dapat menjalankan fungsi dasar seperti perlindungan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan anggota (Kusuma Putri, 2023). Ketahanan keluarga *(family resilience)* merujuk pada proses di mana keluarga mampu menghadapi dan bangkit kembali dari kesulitan, menjadi lebih kuat dan memiliki sumber daya yang lebih baik (Walsh, 2016). Menurut Walsh*, family resilience* terdiri atas beberapa komponen kunci yang saling berkaitan, di antaranya:

- *Belief Systems: Shared facilitation,* yang dimaksudkan dengan bagaimana cara keluarga memaknai situasi sulit, keyakinan bersama, dan pandangan optimis terhadap masa depan.

- *Organizational Resource,* yaitu fleksibilitas struktur peran, hubungan saling membantu, dan jaringan dukungan sosial.
- *Communication/Problem-Solving,* yaitu komunikasi terbuka dan dukungan emosional antaranggota keluarga serta kemampuan bersama untuk menyelesaikan masalah secara efektif.

Teori ini tidak memandang keluarga sebagai sekadar kumpulan individu, tetapi sebagai sistem yang dinamis di mana interaksi antaranggota keluarga dan sumber daya internal eksternal berperan dalam respons terhadap perubahan dan stres.

Menurut perspektif pembangunan keluarga di Indonesia, ketahanan keluarga dipahami sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keluarga yang memiliki ketangguhan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara seimbang (Mujahidin & Amini, 2019). Kemendukbangga/BKKBN mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk hidup mandiri, harmonis, dan sejahtera dengan berlandaskan nilai moral, agama, serta norma sosial yang berlaku. Ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi afeksi, sosialisasi, perlindungan, ekonomi, dan pendidikan. Keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara seimbang akan memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, peran orang tua termasuk ayah menjadi sangat penting dalam membentuk iklim keluarga yang kondusif dan mendukung tumbuh kembang anggota keluarga.

Sejalan dengan konsep di atas, di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial fundamental dalam pembangunan bangsa. Ketahanan

keluarga dipahami secara multidimensional mencakup dimensi legalitas yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum dan kejelasan status keluarga, dimensi ekonomi yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pendapatan rumah tangga yang memadai, serta dimensi kesehatan yang meliputi kondisi fisik dan mental anggota keluarga. Oleh karena itu, konsep ketahanan keluarga menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana implementasi Program GATI berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga.

1.4.2. Teori Father Involvement

Teori Father Involvement menjelaskan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai proses multidimensi yang melibatkan aspek fisik, emosial, dan kognitif untuk mendukung perkembangan optimal anak (Palkovitz, 2014). Palkovitz menekankan bahwa father involvement bukanlah kuantitas waktu, melainkan kualitas hubungan yang holistik. Palkovitz memandang keterlibatan ayah sebagai proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh konteks keluarga, budaya, serta kebijakan sosial. Palkovitz merumuskan keterlibatan ayah dalam tiga dimensi utama, sering disebut model Lamb-Palkovitz:

- *Engagement* (Keterlibatan Langsung) merupakan interaksi fisik dan aktivitas bersama anak seperti bermain, mengajar, berdiskusi, dan rutinitas harian yang membangun ikatan emosional (Syafiqoh & Pranoto, 2022).
- *Accessibility* (Ketersediaan) merupakan kehadiran ayah secara emosional dan fisik meski tidak berinteraksi langsung, seperti mendengarkan atau siap membantu saat dibutuhkan.

- *Responsibility* (Tanggung Jawab) merupakan perencanaan jangka panjang seperti keputusan finansial, kesehatan, pendidikan anak, dan dukungan ibu sebagai partner pengasuhan (Puteri & Rudi, 2021).

Dalam konsep ini, ayah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai figur emosional, pendidik, dan teladan nilai dalam keluarga. Keterlibatan kognitif ayah memungkinkan adanya perencanaan dan pengambilan keputusan yang matang dalam keluarga, sementara keterlibatan afektif memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Di sisi lain, keterlibatan perilaku dan moral ayah menciptakan pola pengasuhan yang konsisten serta lingkungan keluarga yang aman. Hal ini mempertegas bahwa keterlibatan ayah memiliki efek terhadap tumbuh kembang anak dalam banyak aspek yang relevan untuk membangun ketahanan keluarga melalui hubungan suportif dan adaptif (Zulfa, n.d.).

Dalam perspektif teori *father involvement*, GATI berperan sebagai instrumen kebijakan yang mendorong peningkatan keterlibatan ayah secara menyeluruh, baik dalam aspek emosional, kognitif, maupun perilaku. Melalui berbagai aktivitas edukasi, pendampingan, dan kampanye perubahan perilaku, Program GATI berupaya mengatasi fenomena fatherless dan keterbatasan peran ayah dalam keluarga. Keterlibatan ayah yang diperkuat melalui GATI diharapkan mampu meningkatkan kualitas komunikasi keluarga, menciptakan pola asuh yang positif, serta memperkuat fungsi ayah sebagai teladan nilai dan norma sosial. Kondisi tersebut selaras dengan konsep ketahanan keluarga, di mana keluarga yang memiliki keterlibatan ayah yang aktif dan berkualitas

cenderung lebih mampu mengelola konflik, mengatasi krisis, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, teori father involvement memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menjelaskan bahwa Program GATI merupakan salah satu strategi kebijakan yang relevan dan strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui penguatan peran ayah sebagai aktor kunci dalam sistem keluarga.

1.4.3. Fenomena Fatherless.

Fenomena fatherless merujuk pada kondisi anak yang tumbuh tanpa kehadiran peran ayah secara maksimal, baik fisik, emosional, maupun psikologis, meskipun ayah secara biologis ada (Fajarrini & Nasrul, 2023). Ketidakhadiran ayah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perceraian, kematian ayah, pekerjaan yang menyita waktu sehingga mengurangi keterlibatan, atau disengagement (kurangnya keterlibatan emosional meskipun secara fisik hadir). Kondisi ini memiliki berbagai dampak pada perkembangan karakter anak, identitas diri, dan kesejahteraan psikologisnya, yang semuanya seringkali kurang menguntungkan dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan oleh sosok ayah yang kuat (Putri Fajriyanti & Saputri, 2024).

Ketiadaan sosok ayah ini adalah isu yang sering diteliti dari berbagai sudut pandang. Penelitian sosiologis misalnya, mengungkapkan bahwa kondisi tanpa ayah di kalangan remaja putri di Banjarmasin disebabkan oleh perceraian keluarga atau jadwal kerja ayah yang padat, yang selanjutnya memengaruhi perilaku dan perkembangan sosial anak-anak (Fitri, 2024). Sementara dari aspek psikologis, studi lain menunjukkan bahwa anak yang mengalami ketidakadaan figur ayah menghadapi lebih banyak tantangan dalam perkembangan emosional, termasuk

rendahnya pengendalian diri, harga diri yang rendah, kesulitan hubungan interpersonal, dan relevansi terhadap kesehatan mental dewasa awal (Musthofa & Arfensia, 2025).

Berdasarkan data Mikro Susenas BPS Maret 2024, sebanyak 15,9 juta anak atau sekitar 20,1% dari total 79,4 juta anak di Indonesia berada dalam kondisi berpotensi fatherless. Kondisi ini terdiri atas 4,4 juta anak yang hidup tanpa kehadiran ayah di dalam rumah tangga, serta 11,5 juta anak yang memiliki ayah namun mengalami keterbatasan peran akibat beban kerja berlebihan (overwork), sehingga keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi minimal (Raka Maheswara, 2025). Tingginya angka fatherless tersebut berdampak signifikan terhadap perkembangan anak, antara lain ditandai dengan penurunan prestasi akademik, rendahnya kemampuan kontrol diri, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan, yang secara empiris menunjukkan adanya korelasi positif antara kondisi fatherless dan berbagai permasalahan perkembangan anak.

Dalam konteks pembangunan keluarga, fenomena fatherless juga dipandang sebagai salah satu faktor yang melemahkan ketahanan keluarga, karena peran ayah yang kurang optimal dapat mengurangi kualitas fungsi keluarga, termasuk dukungan sosial dan emosional yang dibutuhkan keluarga dalam menghadapi tekanan hidup. Kemendukbangga/BKKBN bahkan menyatakan bahwa fenomena *fatherless* menjadi pertimbangan penting dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga Indonesia agar anak-anak dapat tumbuh dengan karakter kuat dan dukungan keluarga yang memadai (Putri Fajriyanti & Saputri, 2024). Program GATI hadir sebagai respons strategis terhadap fenomena tersebut dengan mendorong peningkatan peran dan keterlibatan ayah

dalam pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan nilai dan karakter anak. Melalui penguatan peran ayah sebagai figur teladan dan pendukung emosional keluarga, berupaya mengurangi dampak negatif *fatherless* dan memperkuat ketahanan keluarga agar lebih adaptif, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial.

1.4.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam bukunya Implementing Public Policy (1980) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan mulai dijalankan dan diuji dalam praktik nyata. (Edwards, 1980) menegaskan bahwa implementasi adalah tahapan krusial pasca-formulasi, dengan menyatakan secara langsung "*Implementation... is the stage of policymaking between the establishment of a policy... and the consequences of the policy for the people whom it affects*." Hal tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berada di antara penetapan suatu kebijakan dan munculnya konsekuensi atau dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang menjadi sasaran.

Kegagalan implementasi kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh konflik politik atau perbedaan kepentingan pada tahap perumusan, melainkan karena lemahnya kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan nyata (manajemen aksi). Pandangan ini sejalan dengan pemahaman

bahwa implementasi merupakan tahap krusial yang menjembatani antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan dampak yang dihasilkan di masyarakat. Implementasi dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aktivitas administratif, organisasi, serta interaksi antar aktor kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III dalam (Aurel & Rahmi, 2021) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*communoication*)

   Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Sunarto, 2021) keberhasilan implementasi menuntut agar para pelaksana mengetahui secara jelas apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana cara melaksanakannya, serta tujuan apa yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perintah dan substansi kebijakan harus ditransmisikan kepada seluruh pelaksana dan kelompok sasaran secara tepat, jelas, dan konsisten agar tidak menimbulkan distorsi interpretasi di tingkat bawah. (Edwards, 1980) menegaskan: "*The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a policy must know what they are supposed to do. Orders to implement a policy must be received and understood by the implementors*." Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh pelaksana, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan.

2. Sumberdaya (*resources*)

   Meskipun perintah kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, proses implementasi tidak akan berjalan efektif apabila para pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Menurut Edward dalam (Tawai & Johanis, 2025) dimensi sumber daya ini bersifat multidimensional, meliputi kecukupan jumlah dan kualitas staf, kompetensi pelaksana, ketersediaan data dan informasi yang akurat, kewenangan hukum (*authority)* yang jelas, serta dukungan fasilitas dan anggaran operasional. Ketiadaan atau keterbatasan salah satu unsur tersebut dapat menghambat bahkan melumpuhkan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Edwards, 1980). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebaik apa pun komunikasi kebijakan dilakukan, keberhasilan implementasi tetap sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaannya.

3. Disposisi

   Menurut Edward dalam (Sunarto, 2021) dalam Disposisi berkaitan dengan karakteristik individu pelaksana, yang mencakup kecenderungan perilaku, pemahaman (kognisi), serta tingkat komitmen terhadap kebijakan. Apabila para pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan selaras dengan tujuan kebijakan, maka proses implementasi cenderung berlangsung efektif dan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika terdapat resistensi, ketidaksepahaman, atau perbedaan nilai kultural, maka implementasi berpotensi mengalami hambatan, baik dalam bentuk penolakan maupun penyimpangan prosedur dari ketentuan yang telah dirumuskan.

4. Struktur Birokrasi

   Variabel terakhir yang menentukan performa implementasi adalah struktur organisasi lembaga pelaksana. Menurut Edwards III dalam (Tawai & Johanis, 2025), dimensi ini terbagi ke dalam dua komponen krusial, yaitu keberadaan Standard Operating Procedures (SOP) dan tingkat fragmentation (*fragmentasi*). SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang memberikan kejelasan alur kerja, pembagian tugas, serta standar operasional yang harus dipatuhi oleh setiap pelaksana, sehingga dapat menjamin konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkatan organisasi.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan itu sendiri, hubungan antara lembaga pelaksana, lingkungan sosial ekonomi, serta mekanisme pengawasan dan umpan balik. Dalam kerangka ini, variabel seperti kesesuaian tujuan kebijakan dengan kapasitas pelaksana, koordinasi antara lembaga terkait, serta respons pelaksana terhadap perubahan kondisi eksternal menjadi determinan utama efektivitas implementasi (Akbar et al., 2025). Dengan pendekatan yang lebih sistemik, Van Meter dan Van Horn membantu memahami bahwa implementasi tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada dinamika sosial yang ada di tingkat lapangan.

Teori implementasi kebijakan menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana kebijakan berjalan (Aurel & Rahmi, 2021). Kebijakan penguatan peran ayah atau GATI dijalankan di tingkat daerah dan komunitas. Program GATI sebagai kebijakan

publik di bidang pembangunan keluarga menuntut adanya komunikasi yang efektif kepada sasaran program, yaitu para ayah dan keluarga, agar tujuan dan manfaat program dapat dipahami secara tepat. Selain itu, keberhasilan implementasi GATI sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia seperti penyuluh keluarga berencana, kader, dan relawan, maupun sumber daya pendukung berupa materi edukasi dan kelembagaan.

Pemahaman terhadap teori implementasi kebijakan menjadi penting untuk menjelaskan keberhasilan atau tantangan dalam penerapan program-program yang ditujukan untuk memperkuat fungsi keluarga. Dengan fokus pada variabel seperti komunikasi kebijakan kepada penerima manfaat, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi antarinstansi, kajian implementasi memberikan alat analisis yang kuat untuk menilai efektivitas program (Anak, 2025). Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan program GATI, teori implementasi kebijakan tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga menjadi kerangka analisis yang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

1.4.5. Gerakan Ayah Teladan Indonesia

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) merupakan salah satu program inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan ayah di dalam pengasuhan anak dan kehidupan keluarga. Program ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya peran ayah dalam keluarga, yang selama ini cenderung diposisikan hanya sebagai pencari nafkah, sementara fungsi pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh ibu (Suri et al., n.d.). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menghadirkan sebuah gerakan yang mampu mengubah paradigma masyarakat

mengenai bagaimana pentingnya peran ayah sebenarnya dalam membentuk dan membangun keluarga harmonis dan berkualitas.

Fenomena rendahnya keterlibatan ayah bahkan telah mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai fatherless, yaitu situasi di mana anak tidak mendapatkan kehadiran ayah secara psikologis dalam proses pengasuhan. Indonesia sendiri disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat fatherless yang cukup tinggi akibat kuatnya budaya patriarki yang menganggap pengasuhan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan terhadap perkembangan anak, baik dari aspek emosional, sosial, maupun pembentukan karakter. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memiliki kontribusi penting dalam perkembangan kognitif, sosial-emosional, serta nilai moral anak (Suciawati et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan peran ayah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam pembangunan keluarga yang berkualitas.

Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) hadir sebagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi ayah dalam pengasuhan anak. Berdasarkan kajian dalam jurnal ilmiah, GATI dikembangkan sebagai respons terhadap rendahnya keterlibatan ayah dan memiliki potensi kuat sebagai model intervensi dalam penguatan keluarga, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor. Program ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada transformasi sosial melalui kampanye, edukasi, dan pelibatan komunitas.

Pelaksanaan GATI didasarkan pada Keputusan Menteri Nomor 119 Tahun 2024 yang memuat panduan pelaksanaan program sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Kepmen ini menegaskan bahwa GATI dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai pendekatan strategis. Dalam pedoman tersebut, terdapat empat pendekatan utama yang digunakan dalam implementasi program, yaitu: (1) pembentukan konsorsium ayah sebagai wadah kolaborasi dan berbagi pengalaman antarayah, (2) pendekatan layanan konsultasi yang menyediakan edukasi dan pendampingan terkait pengasuhan, (3) pendekatan berbasis sekolah untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, serta (4) pendekatan berbasis desa/kelurahan untuk memperluas jangkauan program hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Implementasi GATI juga melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian mengenai implementasi GATI menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan kampanye yang dilakukan oleh lembaga seperti BKKBN mampu meningkatkan kesadaran ayah terhadap perannya dalam keluarga, yang ditunjukkan melalui meningkatnya keterlibatan ayah dalam pendidikan dan kehidupan anak (Husein, 2021). GATI merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan peran ayah. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa program GATI tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga didukung oleh berbagai temuan empiris yang menegaskan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi GATI memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan, tantangan, serta

peluang pengembangan program di masa depan.

1.5. Kerangka Pikir

Fenomena fatherless dan rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi salah satu faktor yang melemahkan ketahanan keluarga, ditandai dengan permasalahan perkembangan emosional anak, prestasi akademik, serta pembentukan karakter. Kondisi ini mendorong pemerintah melalui BKKBN meluncurkan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat peran ayah dalam keluarga.

Dalam pelaksanaannya, Program GATI mengacu pada pedoman dalam Kepmen Nomor 119 Tahun 2024 yang memuat empat pendekatan utama, yaitu pembentukan konsorsium ayah, layanan konsultasi, pendekatan berbasis sekolah, serta pendekatan berbasis desa/kelurahan. Pendekatan-pendekatan ini menjadi strategi operasional dalam meningkatkan keterlibatan ayah di berbagai lini kehidupan masyarakat.eberhasilan Program GATI sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan yang menurut teori Edward III dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi program disampaikan kepada masyarakat, sumber daya mencakup ketersediaan tenaga, anggaran, dan fasilitas, disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan program. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Program GATI dilaksanakan di lapangan, sejauh mana

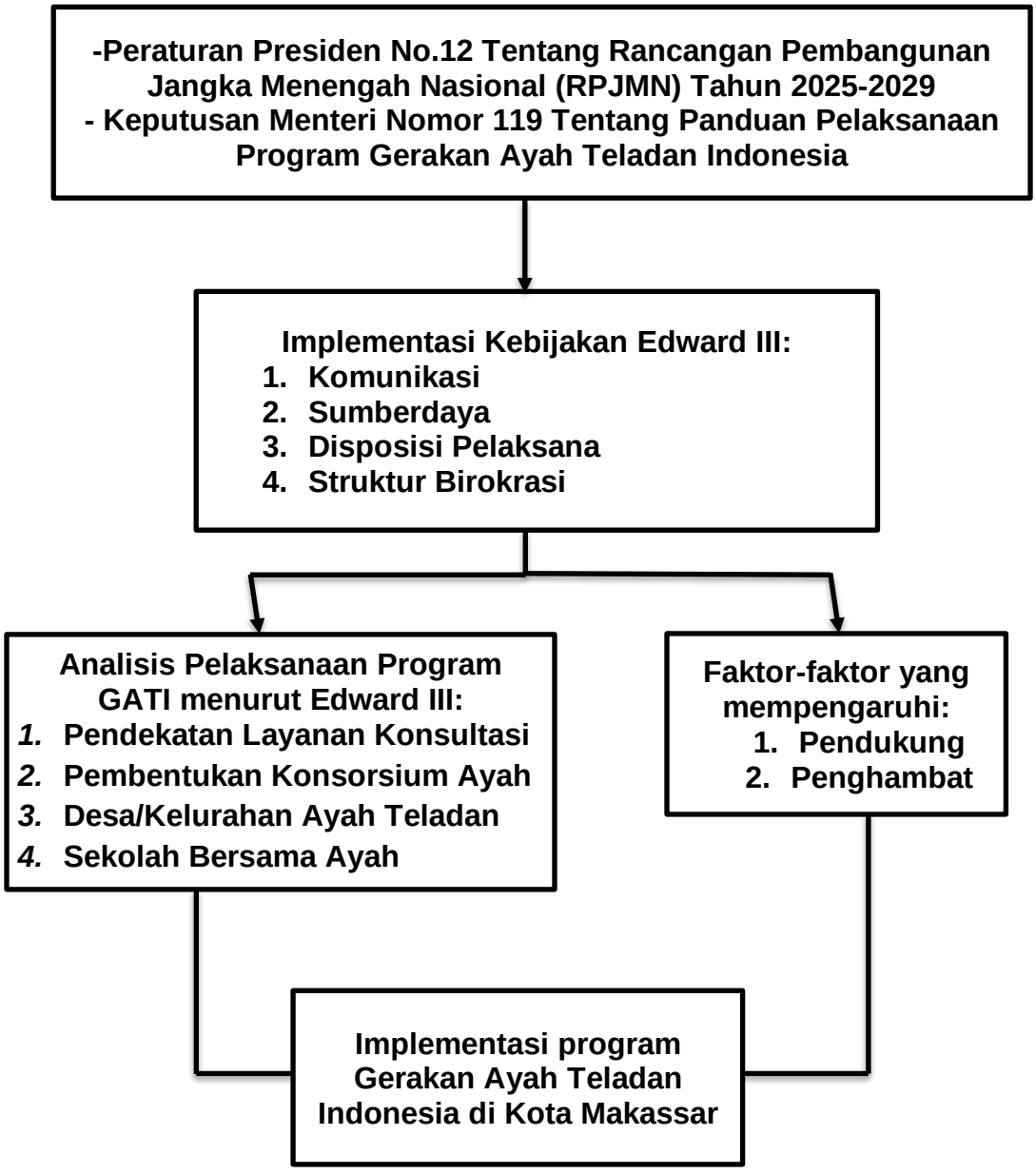
tujuan dan mekanisme program dipahami oleh pelaksana dan sasaran, serta bagaimana koordinasi dan pelaksanaan program dilakukan.

Selanjutnya penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi Program GATI dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kejelasan komunikasi kebijakan, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta jejaring kelembagaan. Sebaliknya, faktor penghambat dapat berupa keterbatasan sumber daya, resistensi budaya terhadap peran ayah dalam pengasuhan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi Program GATI di Kota Makassar.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok rumusan masalah:

a. Bagaimana implementasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Makassar.
b. Faktor apa saja yang mempengar implementasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kota Makassar

Kerangka pikir ini digunakan untuk menganalisis praktik kolaborasi yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola, serta memahami dinamika faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, sekaligus kontribusi praktis dalam perbaikan tata kelola industri pertambangan di daerah.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam implementasi kebijakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika pelaksanaan program, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berupaya menyajikan gambaran faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan Program GATI dalam upaya penguatan ketahanan keluarga.

Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri fenomena sosial dan makna yang diinterpretasikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks, pengalaman, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau statistik. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menelusuri bagaimana proses pelaksanaan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) . Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau bidang tertentu (Moleong, 2017). Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan GATI dijalankan, bagaimana interaksi antar pelaksana dan sasaran program, serta bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program GATI.

Pemilihan pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap realitas empiris secara holistik, termasuk interaksi antar pelaksana, mekanisme pelaksanaan program, serta dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada penyajian fakta, pengalaman, dan persepsi informan secara sistematis, sehingga dinilai paling tepat untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat eksploratif dan kontekstual.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, sebagai kota metropolitan di kawasan Indonesia Timur, Makassar memiliki dinamika sosial yang tinggi sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya terkait keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Kota Makassar juga memiliki karakteristik sosial dan budaya yang beragam, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan penguatan peran ayah diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang heterogen.

Secara lebih spesifik, penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, serta beberapa wilayah kelurahan yang menjadi lokasi implementasi program GATI. Pemilihan instansi tersebut didasarkan pada perannya sebagai pelaksana dan

pendukung utama program, baik dalam hal perencanaan, sosialisasi, maupun pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

Dengan demikian, pemilihan DPPKB Kota Makassar Kemendukbangga/BKKBN Sulsel diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Program GATI serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di tingkat daerah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama kurang lebih dua bulan.

2.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua sumber data ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran atas data yang ditemukan secara utuh mengenai pelaksanaan program GATI di Kota Makassar.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan para informan penelitian. Data yang diperoleh meliputi informasi mengenai proses pelaksanaan program, peran aktor pelaksana, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program GATI di Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis maupun dokumentasi resmi yang mendukung analisis penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

2.4. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan program GATI di Kota Makassar.

a. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
b. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Makassar
c. Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Manggala.
d. Ketua dan Anggota Konsorsium Ayah Teladan Kecamatan Manggala.
e. Masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi program.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu:

a. Observasi Langsung

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pelaksanaan Program GATI, seperti kegiatan sosialisasi, edukasi, atau kampanye peran ayah yang dilaksanakan oleh BKKBN dan instansi terkait yang turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program. Teknik ini membantu peneliti memahami konteks nyata pelaksanaan program dan interaksi antar pelaksana.

b. Wawancara

Digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan kunci terkait implementasi Program GATI. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai

proses pelaksanaan program, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

c. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen resmi, seperti pedoman Program GATI, laporan kegiatan BKKBN Sulsel, notulen rapat, foto kegiatan, serta regulasi terkait program. Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara dan observasi.

2.6. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Makassar. Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dengan menerapkan Teori Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi**.** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan GATI diimplementasikan di tingkat daerah dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029. Fokus utama penelitian meliputi:

1. Fenomena Fatherless dan Keterlibatan Ayah

Fatherless mencakup bentuk-bentuk ketidakhadiran ayah baik secara fisik, emosional, maupun peran dalam keluarga, serta faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Kemudian keterlibatan ayah dalam keluarga, yang meliputi peran ayah dalam pengasuhan anak, pendidikan, pembentukan karakter,

perlindungan, serta dukungan emosional terhadap anggota keluarga.

2. Implementasi Kebijakan GATI melalui Forum Genre Sulawesi Selatan menurut Teori Edward III:
   a. Komunikasi Kebijakan GATI

      Merupakan proses sosialisasi, penyampaian informasi, kejelasan pesan, serta konsistensi komunikasi antara stakeholder untuk melihat bagaimana informasi mengenai program GATI disampaikan kepada masyarakat dan sejauh mana pesan tersebut dapat dipahami.
   b. Sumber daya dalam implementasi kebijakan GATI

      Merupakan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta informasi pendukung yang dimiliki dalam melaksanakan program GATI.
   c. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan

      Mencakup komitmen, pemahaman, dan sikap para pelaksana serta kesungguhan pelaksana dalam mendukung dan menjalankan kebijakan program GATI.
   d. Struktur birokrasi

      Merupakan pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta hubungan kelembagaan dengan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan GATI.
3. Faktor-faktor yang mempengarahi antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat:
   a. Faktor pendukung adalah segala hal yang mendukung/membantu dalam pelaksanaan program GATI.
   b. Faktor penghambat adalah segala hal yang mengganjal/menghambat dalam pelaksanaan program GATI.

2.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang bersifat dinamis, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), proses analisis data kualitatif terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data *(Data Collection*)

   Data dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait pelaksanaan Program GATI melalui Forum Genre Sulawesi Selatan. Seluruh data yang diperoleh direkam, ditranskripsi, dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data sesuai dengan tema implementasi Program GATI, serta faktor pendukung dan penghambat program GATI di Kota Makassar. Proses reduksi ini bertujuan agar data lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis secara mendalam.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

   Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan makna dalam proses pelaksanaan program. Penyajian data disusun berdasarkan fokus penelitian dan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan serta konsep

ketahanan keluarga.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

   Tahap ini dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan sementara, kemudian diverifikasi secara berulang melalui pengecekan kembali data lapangan. Kesimpulan akhir diperoleh setelah data dianggap konsisten, valid, dan menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan makna dari pola dan hubungan yang ditemukan selama proses analisis data.

Proses analisis data ini bersifat siklus dan saling berkaitan antar tahapnya. Data yang diperoleh tidak dianalisis secara linier, melainkan melalui proses bolak-balik antara lapangan, teori, dan hasil wawancara untuk memperkuat interpretasi. Dengan demikian, hasil analisis dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan program GATI dapat berjalan secara efektif.